

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Negeri Lubuklinggau adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Badan Peradilan Umum yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Lubuklinggau mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Negeri Lubuklinggau. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Lubuklinggau, Januari 2022

Sekretaris / Kuasa Pengguna Anggaran
Pengadilan Negeri Lubuklinggau



PATRA SUKMA, S.Kom., S.H., M.H
NIP-197907092009041002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	viii
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB.....	vi
RINGKASAN.....	vii
LAPORAN REALISASI ANGGARAN.....	ix
NERACA.....	x
LAPORAN OPERASIONAL.....	xi
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....	xii
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN.....	1
A. PENJELASAN UMUM.....	1
A.1. Dasar Hukum.....	1
A.2. Profil Dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri Lubuklinggau.....	2
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan.....	3
A.4. Basis Akuntansi.....	4
A.5. Dasar Pengukuran.....	4
A.6. Kebijakan Akuntansi.....	4
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN.....	12
B.1 Pendapatan.....	12
B.2 Belanja Pegawai.....	16
B.3 Belanja Barang.....	16
B.4 Belanja Modal.....	17
B.4.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin.....	18
B.4.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan.....	18
B.4.3 Belanja Modal Jaringan.....	18

B.4.4 Belanja Modal Lainnya.....	19
C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA.....	20
C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran.....	20
C.2 Belanja Dibayar Dimuka (<i>Prepaid</i>).....	20
C.3 Piutang Bukan Pajak.....	21
C.4 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak.....	21
C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).....	21
C.6 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).....	22
C.7 Persediaan.....	22
C.8 Persediaan Yang Belum Diregister.....	23
C.9 Tanah.....	23
C.10 Peralatan dan Mesin.....	28
C.11 Gedung dan Bangunan.....	29
C.12 Jalan, Irigasi dan Jaringan.....	29
C.13 Aset Tetap Lainnya.....	30
C.14 Konstruksi Dalam Pengerjaan.....	30
C.15 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap.....	31
C.16 Piutang Tagihan TP/TGR.....	31
C.17 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan TP/TGR.....	32
C.18 Aset Tak Berwujud.....	32
C.19 Aset Lain-Lain.....	32
C.20 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya.....	33
C.21 Utang kepada Pihak Ketiga.....	33
C.22 Pendapatan Diterima di Muka.....	34
C.23 Uang Muka dari KPPN.....	34
C.24 Ekuitas.....	34
D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL.....	36

LAPORAN KEUANGAN Pengadilan Negeri Lubuklinggau SEMESTER II TAHUN 2021

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak.....	36
D.2 Beban Pegawai.....	36
D.3 Beban Persediaan.....	37
D.4 Beban Barang dan Jasa.....	37
D.5. Beban Pemeliharaan.....	38
D.6 Beban Perjalanan Dinas.....	38
D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi.....	39
D.8 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih.....	39
D.9 Surplus dari Kegiatan Non Operasional.....	40
E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....	41
E.1 Ekuitas Awal.....	41
E.2 Defisit LO.....	41
E.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap.....	41
E.4 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi.....	41
E.5 Koreksi Lain-lain.....	41
E.6 Transaksi Antar Entitas.....	41
E.6.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL).....	42
E.6.2 Transfer keluar.....	42
E.7 Ekuitas Akhir.....	42
F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA.....	203
F.1. Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca.....	203
F.2. Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI.....	203
F.3. Pengungkapan Lain-Lain.....	203

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan.....	13
Tabel 2. Perbandingan Realisasi PNPB TA 2021 dan TA 2020.....	14
Tabel 3. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja periode 30 desember 2021.....	14
Tabel 4. Perbandingan Realisasi Belanja TA 2021 dan TA 2020.....	15
Tabel 5. Perbandingan Belanja Pegawai TA 2021 dan TA 2020.....	16
Tabel 6. Perbandingan Belanja Barang TA 2021 dan TA 2020.....	17
Tabel 7. Perbandingan Belanja Modal TA 2021 dan TA 2020.....	17
Tabel 8. Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2021 dan TA 2020.....	18
Tabel 9. Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2021 dan TA 2020.....	18
Tabel 10. Perbandingan Belanja Modal Jaringan TA 2021 dan TA 2020.....	19
Tabel 11. Perbandingan Belanja Modal Lainnya TA 2021 dan TA 2020.....	19
Tabel 12. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Per 30 desember 2021 dan 31 Desember 2020.....	20
Tabel 13. Rincian Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid) Per 30 desember 2021 dan 31 Desember 2020	20
Tabel 14. Rincian Piutang Bukan Pajak Per 30 desember 2021 dan 31 Desember 2020	Error!
	Bookmark not defined.
Tabel 15. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang Bukan Pajak Per 30 desember 2021.....	21
Tabel 16. Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi 30 desember 2021 dan 31 Desember 2020.....	22
Tabel 17. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Per 30 desember 2021.....	22
Tabel 18. Rincian Persediaan.....	23
Tabel 19. Rincian Saldo Tanah Per 30 desember 2021.....	25
Tabel 20. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 21. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya.....	33
Tabel 22. Perbandingan Rincian Pendapatan 30 desember 2021 dan 30 desember 2020.....	36
Tabel 23. Perbandingan Rincian Beban Pegawai 30 desember 2021 dan 30 desember 2020.....	37
Tabel 24. Perbandingan Rincian Beban Persediaan 30 desember 2021 dan 30 desember 2020.....	37
Tabel 25. Rincian Beban Barang dan Jasa 30 desember 2021 dan 30 desember 2020.....	38
Tabel 26. Rincian Beban Pemeliharaan 30 desember 2021 dan 30 desember 2020.....	38
Tabel 27. Rincian Beban Perjalanan Dinas 30 desember 2021 dan 30 desember 2020.....	39
Tabel 28. Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi 30 desember 2021 dan 30 desember 2020.....	39
Tabel 29. Rincian Beban Piutang tak Tertagih 30 desember 2021 dan 30 desember 2020.....	40
Tabel 30. Rincian Kegiatan Non Operasional 30 desember 2021 dan 30 desember 2020.....	40

Pengadilan Negeri Lubuklinggau

Jl. Depati Said No. 1 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Lubuklinggau Barat II

Telp. 0733 321570 Fax. 0733 321570 Kode Pos 31616

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Semester II Tahun 2021 yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan sampai dengan 31 desember 2021 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Lubuklinggau telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Lubuklinggau, Januari 2021

Kuasa Pengguna Anggaran

Patra Sukma, S.Kom., S.H., M.H

NIP. 19790709 200904 1 002

RINGKASAN

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Semester II Tahun 2021 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari s.d. 31 desember 2021.

Realisasi Pendapatan Negara TA 2021 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 38.943.500,00 dari estimasi pendapatan sebesar Rp 6.290.000,00 atau mencapai 619,13 persen.

Realisasi Belanja Negara TA 2021 adalah sebesar Rp 373.932.413,00 atau mencapai 96,21 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 388.670.000,00.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 desember 2021. Nilai Aset per 31 desember 2021 dicatat dan disajikan sebesar Rp 2.111.164,00, yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp 2.111.164,00; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp 0,00; Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp 0,00; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp 0,00. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 2.111.164,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus (defisit) dari operasi, surplus(defisit) dari kegiatan non operasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus(defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 desember 2021 adalah sebesar Rp 38.943.500,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp 383.887.743,00 sehingga terdapat defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp 344.944.243,00). Surplus Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp0,00 sehingga entitas mengalami defisit-LO sebesar Rp (Rp 344.944.243,00).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2021 adalah sebesar Rp 2.111.164,00 dikurangi defisit-LO sebesar (Rp 344.944.243,00), kemudian ditambah dengan koreksi yang mengurangi ekuitas sebesar Rp 0,00 dan ditambah dengan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp 344.944.243,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Desember 2021 adalah senilai Rp 2.111.164,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Pengadilan Negeri Lubuklinggau
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
31 Desember 2021 DAN 31 Desember 2020

URAIAN	CATATAN	TA 2021			TA 2020		
		ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI TERHADAP ANGGARAN	ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI TERHADAP ANGGARAN
PENDAPATAN							
1. Pendapatan	B.1	6.290.000,00	38.943.500,00	619,13	14.065.000,00	31.194.500,00	221,79
Jumlah Pendapatan		6.290.000,00	38.943.500,00	619,13	14.065.000,00	31.194.500,00	221,79
BELANJA							
1. Belanja Pegawai	B.2	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
2. Belanja Barang	B.3	388.670.000,00	373.932.413,00	96,21	435.480.000,00	381.197.868,00	87,54
3. Belanja Modal	B.4	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
Jumlah Belanja		388.670.000,00	373.932.413,00	96,21	435.480.000,00	381.197.868,00	87,54

NERACA

Pengadilan Negeri Lubuklinggau
NERACA
PER 31 Desember 2021 DAN 31 Desember 2020

NAMA PERKIRAAN	CATATAN	JUMLAH	
		DESEMBER 2021	DESEMBER 2020
1	2	3	4
ASET			
Aset Lancar	C		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C. 1		
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C. 2		
Piutang Bukan Pajak	C. 3		
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C. 4	-	
Piutang Bukan Pajak (Netto)			
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan	C. 5		
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar	C. 6		
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi			
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan			
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto)			
Persediaan	C. 7	2.111.164	2.111.164
Persediaan yang Belum Diregister	C. 8		
Jumlah Aset Lancar		2.111.164	2.111.164
Aset Tetap			
Tanah	C. 9	-	
Peralatan dan Mesin	C. 10		
Gedung dan Bangunan	C. 11		
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C. 12		
Aset Tetap Lainnya	C. 13		
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C. 14		
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C. 15		
Jumlah Aset Tetap			
Piutang Tagihan TP/TGR	C. 16		
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan TP/TGR	C. 17	-	
Tagihan TP/TGR (Netto)			
Jumlah Piutang Jangka Panjang			
Aset Lainnya			
Aset Tak Berwujud	C. 18		
Aset Lain-Lain	C. 19		
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C. 20		
Jumlah Aset Lainnya			
JUMLAH ASET		2.111.164	2.111.164
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang Kepada Pihak Ketiga	C. 21		
Pendapatan Diterima Dimuka	C. 22		
Uang Muka dari KPPN	C. 23		
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek			
JUMLAH KEWAJIBAN			
EKUITAS			
Ekuitas	C. 24	2.111.164	2.111.164
JUMLAH EKUITAS		2.111.164	2.111.164
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		2.111.164	2.111.164

LAPORAN OPERASIONAL

Pengadilan Negeri Lubuklinggau
LAPORAN OPERASIONAL
31 Desember 2021 DAN 31 Desember 2020

URAIAN	CATATAN	TA 2021	TA 2020
1	2	3	4
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK			
PENDAPATAN PERPAJAKAN			
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK LAINNYA		38.943.500	31.194.500
PENDAPATAN HIBAH			
JUMLAH PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	D. 1	38.943.500	31.194.500
BEBAN			
BEBAN PEGAWAI	D. 2		
BEBAN PERSEDIAAN	D. 3	91.240.830	81.467.521
BEBAN BARANG DAN JASA	D. 4	108.790.913	113.345.368
BEBAN PEMELIHARAAN	D. 5	17.554.000	25.635.000
BEBAN PERJALANAN DINAS	D. 6	166.302.000	167.188.000
BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	D. 7		
BEBAN PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH	D. 8		
JUMLAH BEBAN		383.887.743	387.635.893
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(344.944.243)	(356.441.393)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar			
Beban Pelepasan Aset Non Lancar			
Lancar			
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA			
Lainnya			
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
Jumlah Surplus/(defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
OPERASIONAL	D. 9		
POS LUAR BIASA			
SURPLUS (DEFISIT) LO		(344.944.243)	(356.441.393)

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Pengadilan Negeri Lubuklinggau
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
31 Desember 2021 DAN 31 Desember 2020

URAIAN	CATATAN	DESEMBER 2021	DESEMBER 2020
1	2	3	4
EKUITAS AWAL	E. 1	2.111.164,00	2.111.164,00
SURPLUS / DEFISIT	E. 2	(344.944.243,00)	(356.441.393,00)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS			
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN / KESALAHAN MENDASAR			
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E. 3	-	-
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E. 4	-	-
Koreksi lain-lain	E. 5		
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E. 6	344.944.243,00	356.441.393,00
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		-	-
EKUITAS AKHIR	E. 7	2.111.164,00	2.111.164,00

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

Dasar
Hukum

A.1. Dasar Hukum

1. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;](#)
2. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;](#)
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, untuk Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;](#)
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2013 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintah Pada Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;

owner 2012-11-26 14:07 ✓

Deleted: ;

owner 2012-11-26 14:07 ✓

Formatted: Indent: Left: 6.3 mm, Hanging: 8 mm, Space Before: 0 pt, After: 0 pt, Font Alignment: Auto, Tab stops: 3.88 ch, Left + Not at 2.91 ch + 42.94 ch, Border: Bottom: (No border), Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 6.4 mm + Indent at: 14.4 mm, Automatically adjust right indent when grid is defined

owner 2012-11-26 14:07 ✓

Deleted: ;

owner 2012-11-26 14:07 ✓

Formatted: Indent: Left: 6.3 mm, Hanging: 8 mm, Space Before: 0 pt, After: 0 pt, Font Alignment: Auto, Tab stops: 3.88 ch, Left + Not at 2.91 ch + 42.94 ch, Border: Bottom: (No border), Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 6.4 mm + Indent at: 14.4 mm, Automatically adjust right indent when grid is defined

2011-02-21 15:09 ✓

Deleted: 24

owner 2012-12-10 08:44 ✓

Formatted: Font: (Default) Calibri, Indonesian

2011-02-21 15:09 ✓

Deleted: 05

owner 2012-12-10 08:44 ✓

Formatted: Font: (Default) Calibri, Indonesian

fjatnika 2010-11-10 23:10 ✓

Formatted: Font: (Default) Arial, Finnish

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor : 90/PMMK.06/2014;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat;
17. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengadilan Negeri Lubuklinggau dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

A.2. Profil Dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri Lubuklinggau

Profil dan
Kebijakan
Teknis
Pengadilan
Negeri
Lubuklinggau

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Lubuklinggau

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Lubuklinggau Tahun 2015-2021 merupakan lanjutan dari Renstra Pengadilan Negeri Lubuklinggau Tahun 2010-2014 adalah menguraikan tentang Tujuan yang disinkronisasikan dengan Indikator Tujuan, Sasaran dengan Indikator Sasaran dan Target yang dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2015-2021.

Visi dan Misi Pengadilan Negeri Lubuklinggau

Dalam rangka mewujudkan harapan di masa depan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Mahkamah Agung RI menetapkan visi sebagai berikut :

“MENDUKUNG TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN YANG AGUNG”.

Visi Pengadilan Negeri Lubuklinggau mewujudkan :

- a. Terpenuhinya sumber daya manusia Mahkamah Agung RI dan badan-badan peradilan dibawahnya yang profesional dan berintegritas.
- b. Terpenuhinya kebutuhan anggaran dan sarana prasarana peradilan yang memadai.
- c. Terlaksananya pelayanan publik yang prima oleh Mahkamah Agung RI dan badan-

owner 2012-12-10 20:28	✓	🗑️
Deleted:		
owner 2012-11-26 13:56	✓	🗑️
Formatted: Font: (Default) Calibri, 11 pt, Indonesian		
owner 2012-11-28 20:57	✓	🗑️
Formatted: Font: (Default) Calibri, 11 pt, Bold, English(UK)		
fjatnika 2010-11-10 23:13	✓	🗑️
Deleted:		
owner 2012-11-26 13:56	✓	🗑️
Formatted: Font: (Default) Calibri, English(United States)		
owner 2012-12-10 08:45	✓	🗑️
Formatted: Heading 4, Justified, No widow/orphan control		
owner 2012-11-28 15:23	✓	🗑️
Deleted: RENCANA STRATEGIS <KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGANAMA SATKER>		
owner 2012-12-10 08:48	✓	🗑️
Formatted: Font: (Default) Calibri		
owner 2012-12-10 08:48	✓	🗑️
Formatted: Font: (Default) Calibri, (Asian) Calibri, 11 pt, Not Bold		
owner 2012-11-26 13:56	✓	🗑️
Formatted: Font: (Default) Calibri, 9 pt, Not Bold		
owner 2012-11-26 13:56	✓	🗑️
Formatted: Font: (Default) Calibri, 11 pt		
fjatnika 2010-11-10 23:10	✓	🗑️
Formatted: Font: (Default) Arial, Finnish		

badan peradilan dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Misi Pengadilan Negeri Lubuklinggau:

Untuk mencapai visi Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang telah ditetapkan tersebut maka ditetapkan pula misi Pengadilan Negeri Lubuklinggau sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemampuan dan kuantitas sumber daya manusia.
2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja pegawai.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.
4. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran.
5. Meningkatkan kelembagaan/ organisasi peradilan yang efektif dan efisien.
6. Meningkatkan pengelolaan anggaran secara akuntabel dan transparan.
7. Meningkatkan sistem informasi yang handal dan profesional.
8. Meningkatkan ketatalaksanaan yang berkualitas.
9. Meningkatkan penatausahaan aset negara.
10. Meningkatkan pelayanan administrasi.

Tujuan

Terkoordinasinya pembinaan dan pelaksanaan perencanaan, pengorganisasian, administrasi kepegawaian, finansial, perlengkapan dan ketatausahaan pengadilan di lingkungan Mahkamah Agung .

Pendekatan
Penyusunan
Laporan Keuangan

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester II Tahun 2021 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Negeri Lubuklinggau. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan

owner 2012-12-10 08:48 ✓

Formatted: Font: (Default) Calibri, (Asian) SimSun, Bold, English(UK)

owner 2012-11-28 19:37 ✓

Formatted: Font: (Default) Calibri, 11 pt, Not Bold, English(United States)

fjatnika 2010-11-10 23:10 ✓

Formatted: Font: (Default) Arial, Finnish

manajerial lainnya.

■ Basis Akrua

A.4. Basis Akuntansi

Pengadilan Negeri Lubuklinggau menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pengadilan Negeri Lubuklinggau dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan akuntansi

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester II Tahun 2021 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan

owner 2012-12-10 08:48	✓	🔍
Formatted: Font: (Default) Calibri		
owner 2012-12-10 08:48	✓	🔍
Formatted: Font: (Default) Calibri, (Asian) Calibri, 11 pt, Not Bold, No underline		
owner 2012-11-28 20:04	✓	🔍
Deleted: Pendapatan		
PENDAPATAN <KEMENTERIAN		
owner 2012-11-28 19:36	✓	🔍
Formatted: Indent: Left: 0 mm		
owner 2012-11-26 13:56	✓	🔍
Formatted: Font: (Default) Calibri, 11 pt,		
Dennazam 2012-07-23 13:46	✓	🔍
Deleted:		
owner 2011-05-31 08:48	✓	🔍
Deleted:		
owner 2012-11-26 13:56	✓	🔍
Formatted: Font: (Default) Calibri, Indonesian		
owner 2012-11-26 13:56	✓	🔍
Formatted: Font: (Default) Calibri, 11 pt, No'		
owner 2012-11-26 14:08	✓	🔍
Formatted: Font: (Default) Calibri, Indonesian		
fjatnika 2010-11-10 23:34	✓	🔍
Formatted: Left		
owner 2012-11-28 20:25	✓	🔍
Formatted: Heading 4, Justified, Space Before:		
owner 2012-12-10 08:48	✓	🔍
Formatted: Font: (Default) Calibri, (Asian)		
owner 2012-12-10 08:48	✓	🔍
Formatted: Font: (Default) Calibri, (Asian)		
owner 2012-12-10 08:48	✓	🔍
Formatted: Font: (Default) Calibri, (Asian)		
owner 2012-11-28 20:03	✓	🔍
Formatted: Font: (Default) Calibri, 11 pt, No'		
fjatnika 2010-11-10 23:10	✓	🔍
Formatted: Font: (Default) Arial, Finnish		

dan penyajian laporan keuangan.

Kebijakan Akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang merupakan entitas pelaporan dari Pengadilan Negeri Lubuklinggau. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Lubuklinggau adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan – LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan – LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan persekot gaji;
 - Pendapatan atas sewa tanah, gedung, dan bangunan;
 - Pendapatan atas Tagihan Tuntutan ganti Rugi (TGR).
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

owner 2012-11-27 21:26 ✓

Deleted: Laporan Realisasi Anggaran disusun menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN) atau dikeluarkan dari KUN.

Penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari KUN.

Penyusunan dan penyajian LKTahun 2XX1 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam penyusunan LKKL telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan LK<Kementerian Negara/Lembaga>Nama Satker>

owner 2012-12-10 08:48 ✓

Formatted: Font: (Default) Calibri, Bold, Not Superscript/ Subscript

owner 2012-12-10 08:48 ✓

Formatted: Font: (Default) Calibri, Bold, Not Superscript/ Subscript

owner 2012-12-10 08:48 ✓

Formatted: Font: (Default) Calibri, Bold, No*

owner 2012-12-10 08:48 ✓

Formatted: Font: (Default) Calibri, Bold, No*

owner 2012-12-10 08:48 ✓

Formatted: Font: (Default) Calibri, Bold, No*

owner 2012-12-10 08:48 ✓

Formatted: Font: (Default) Calibri, Bold, No*

owner 2012-12-10 08:48 ✓

Formatted: Font: (Default) Calibri, Indonesian

fjatnika 2010-11-10 23:10 ✓

Formatted: Font: (Default) Arial, Finnish

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.

- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal;
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut :

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.

LAPORAN KEUANGAN Pengadilan Negeri Lubuklinggau SEMESTER II TAHUN 2021

- Nilai persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan :
 - Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

LAPORAN KEUANGAN Pengadilan Negeri Lubuklinggau SEMESTER II TAHUN 2021

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

- Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat aset tak berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut :

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan.	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I.	70

fjatnika 2010-11-10 23:10

Formatted: Font: (Default) Arial, Finnish

Kebijakan
Akuntansi atas
Kewajiban

- Aset lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.
- (6) Kewajiban**
- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
 - Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
 - Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

owner 2012-11-28 20:26

Deleted:

Investasi

Investasi *1*)

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi pemerintah diklasifikasikan kedalam investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki dalam kurun waktu setahun atau kurang. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari setahun. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu non permanen dan permanen.

(i) Investasi Non Permanen

Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen dan dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi non permanen sifatnya bukan penyertaan modal saham melainkan berupa pinjaman jangka panjang yang dimaksudkan untuk pembiayaan investasi perusahaan negara/ daerah, pemerintah daerah, dan pihak ketiga lainnya.

Investasi Non Permanen meliputi:

Seluruh dana pemerintah yang bersumber dari dana pinjaman luar negeri yang diteruskanpinjamkan melalui *Subsidiary Loan Agreement* (SLA) dan dana dalam negeri dalam bentuk Rekening Dana Investasi (RDI) dan Rekening Pembangunan Daerah (RPD) yang dijaminan kepada BUMN/BUMD

fjatnika 2010-11-10 23:10

Formatted: Font: (Default) Arial, Finnish

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Pengadilan Negeri Lubuklinggau telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain :

Uraian	Tahun 2021	
	Anggaran Awal	Setelah Revisi
Pendapatan	6.290.000	6.290.000
Pendapatan Lain-lain	-	-
Jumlah Pendapatan	6.290.000	6.290.000
Belanja		
Belanja Pegawai	-	-
Belanja Barang	388.670.000	388.670.000
Belanja Modal	-	-
Jumlah Belanja	388.670.000	388.670.000

Realisasi

*Pendapatan Rp
38.943.500,00*

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir 31 desember 2021 adalah sebesar Rp 38.943.500,00 dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp 6.290.000,00.

LAPORAN KEUANGAN Pengadilan Negeri Lubuklinggau SEMESTER II TAHUN 2021

Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi Pendapatan Pengadilan Negeri Lubuklinggau adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	2021		
		Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
425231	Pendapatan pengesahan surat dibawah tangan	20.000,00		0
425233	Pendapatan uang meja (leges) dan upah panitera badan peradilan	20.000,00	210.000,00	1050,00
425233	Pendapatan ongkos perkara	1.280.000,00	6.180.000,00	482,81
425239	Pendapatan kejaksaan dan peradilan lainnya	4.970.000,00	32.553.500,00	655,00
425764	Pendapatan jasa lembaga keuangan / jasa giro			#DIV/0!
Jumlah Pendapatan Bruto		6.290.000,00	38.943.500,00	619,13
Pengembalian				0,00
Jumlah Pendapatan Netto		6.290.000,00	38.943.500,00	619,13

Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak periode 31 desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp7.749.000,00 dibandingkan realisasi periode 30 desember 2020. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Terdapat kenaikan dalam pendapatan uang meja, ongkos perkara, kejaksaan dan peradilan lainnya.

Perbandingan realisasi PNBP TA 2021 dan TA 2020 disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2. Perbandingan Realisasi PNBP TA 2021 dan TA 2020

(dalam rupiah)

KODE	Uraian	TA 2021	TA 2020	Kenaikan (Penurunan)	
				Rp	%
425231	Pendapatan pengesahan surat dibawah tangan				#DIV/0!
425232	Pendapatan uang meja (leges) dan upah pada panitera badan peradilan	210.000,00	220.000,00	(10.000,00)	(4,55)
425233	Pendapatan ongkos perkara	6.180.000,00	4.180.000,00	2.000.000,00	47,88
425239	Pendapatan kejaksaan dan peradilan lainnya	32.553.500,00	26.794.500,00	5.759.000,00	21,49
425764	Pendapatan jasa lembaga keuangan / jasa giro				#DIV/0!
Jumlah Pendapatan Netto		38.943.500,00	31.194.500,00	7.749.000,00	24,8

Belanja

Realisasi
Belanja
Negara Rp
373.932.413,00

Realisasi Belanja Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada periode 31 desember 2021 adalah sebesar Rp 373.932.413,00 atau 96,21% dari anggaran belanja sebesar Rp 388.670.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja periode 31 desember 2021 tersaji sebagai berikut:

Tabel 3. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja periode 31 desember 2021

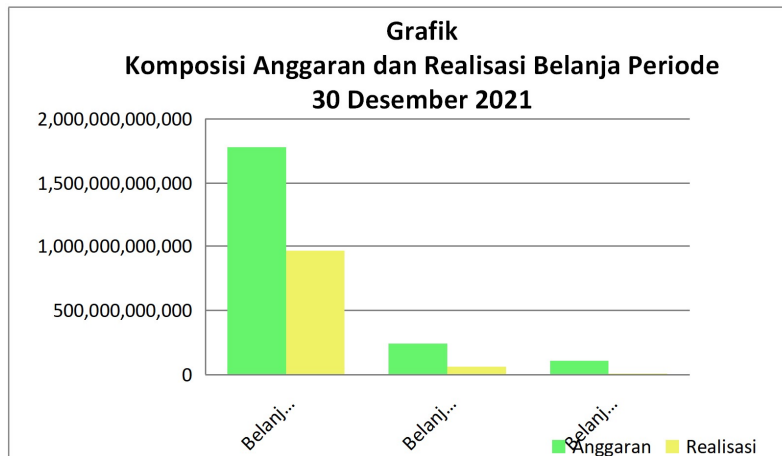
(dalam rupiah)

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi Belanja	%
51	Belanja Pegawai			#DIV/0!
52	Belanja Barang	388.670.000,00	373.932.413,00	96,21
53	Belanja Modal			#DIV/0!
Jumlah Belanja Bruto		388.670.000,00	373.932.413,00	96,21
Pengembalian Belanja				
Jumlah Belanja Netto		388.670.000,00	373.932.413,00	96,21

fjatnika 2010-11-10 23:10

Formatted: Font: (Default) Arial, Finnish

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini :



Realisasi belanja periode 31 desember 2021 mengalami penurunan sebesar Rp 7.265.455,00 atau sebesar 1,91% dibandingkan realisasi periode 31 desember 2020. Hal ini antara lain disebabkan oleh adanya penurunan belanja barang pada Satuan Kerja Pengadilan Negeri Lubuklinggau. Rincian penyebab penurunan belanja akan dijelaskan dalam masing-masing jenis belanja.

Perbandingan realisasi belanja periode 31 desember 2021 dan 31 desember 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4. Perbandingan Realisasi Belanja TA 2021 dan TA 2020

(dalam rupiah)

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/ (Penurunan)	
		TA 2021	TA 2020	(Rp)	%
51	Belanja Pegawai	-	-	-	#DIV/0!
52	Belanja Barang	373.932.413,00	381.197.868,00	(7.265.455,00)	(1,91)
53	Belanja Modal	-	-	-	#DIV/0!
Jumlah Belanja Netto		373.932.413,00	381.197.868,00	(7.265.455,00)	(1,91)

fjtnika 2010-11-10 23:10

Formatted: Font: (Default) Arial, Finnish

Belanja
Pegawai
Rp 0,00

B.2 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai periode 31 desember 2021 dan 31 desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00. Realisasi Belanja Pegawai mengalami penurunan sebesar Rp 0,00 atau 0,00% dibandingkan dengan realisasi Belanja Pegawai periode 30 desember 2020.

Rincian belanja pegawai disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5. Perbandingan Belanja Pegawai TA 2021 dan TA 2020

(dalam rupiah)

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2021	TA 2020	(Rp)	%
Belanja Gaji Pokok PNS				
Belanja Pembulatan Gaji PNS				
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS				
Belanja Tunj. Anak PNS				
Belanja Tunj. Struktural PNS				
Belanja Tunj. Fungsional PNS				
Belanja Tunj. PPh PNS				
Belanja Tunj. Beras PNS				
Belanja Uang Makan PNS				
Belanja Tunjangan Umum PNS				
Belanja Uang Lembur				
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)				
Realisasi Belanja Bruto				
Pengembalian				
Realisasi Belanja Netto				

Belanja
Barang Rp
373.932.413,00

B.3 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang periode 31 desember 2021 dan 31 desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 373.932.413,00 dan Rp 381.197.868,00. penurunan sebesar Rp 7.265.455,00 atau sebesar 1,91% dibandingkan realisasi periode 31 desember 2020. Hal ini antara lain disebabkan oleh adanya penurunan belanja barang pada Satuan Kerja Pengadilan Negeri Lubuklinggau. Rincian penyebab penurunan belanja akan dijelaskan dalam masing-masing jenis belanja. penurunan ini diakibatkan turunnya biaya pemeliharaan dan biaya sewa.

fjatnika 2010-11-10 23:10

Formatted: Font: (Default) Arial, Finnish

Rincian Belanja Barang disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 6. Perbandingan Belanja Barang TA 2021 dan TA 2020

(dalam rupiah)

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2021	TA 2020	(Rp)	%
Belanja Barang Operasional	-	-	-	-
Belanja Barang Non Operasional	-	-	-	-
Belanja Barang Persediaan	98.839.500,00	100.664.500,00	(1.825.000,00)	(1,81)
Belanja Jasa	24.000.000,00	26.200.000,00	(2.200.000,00)	(8,40)
Belanja Bahan Pemeliharaan	84.790.913,00	87.145.368,00	(2.354.455,00)	(2,70)
Belanja Perjalanan Dinas	166.302.000,00	167.188.000,00	(886.000,00)	(0,53)
Realisasi Belanja Bruto	373.932.413,00	381.197.868,00	(7.265.455,00)	(1,91)
Pengembalian	-	-	-	-
Realisasi Belanja Netto	373.932.413,00	381.197.868,00	(7.265.455,00)	(1,91)

Belanja

Modal Rp 0,00

B.4 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal periode 31 desember 2021 dan 31 desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00. Realisasi Belanja Modal mengalami penurunan sebesar Rp 0,00 atau 0,00% dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal periode 31 desember 2020. Penurunan ini dikarenakan terdapat penyesuaian sarana dan prasarana untuk menunjang pencapaian Tugas Pokok dan Fungsi.

Rincian Belanja Modal disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 7. Perbandingan Belanja Modal TA 2021 dan TA 2020

(dalam rupiah)

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2021	TA 2020	(Rp)	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin				
Belanja Modal Gedung dan Bangunan				
Belanja Modal Jaringan				
Belanja Modal Lainnya				
Realisasi Belanja Bruto				
Pengembalian				
Realisasi Belanja Netto				

fjtnika 2010-11-10 23:10

Formatted: Font: (Default) Arial, Finnish

B.4.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin periode 31 desember 2021 dan 31 desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin mengalami kenaikan sebesar Rp 0,00 atau 0,00% dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin periode 31 desember 2020.

Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 8. Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2021 dan TA 2020

(dalam rupiah)

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2021	TA 2020	(Rp)	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin				
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Peralatan dan Mesin				
Realisasi Belanja Bruto				
Pengembalian				-
Realisasi Belanja Netto				

B.4.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan periode 31 desember 2021 dan 31 desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00.

Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 9. Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2021 dan TA 2020

(dalam rupiah)

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2021	TA 2020	(Rp)	%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan				
Realisasi Belanja Bruto				
Pengembalian				-
Realisasi Belanja Netto				

B.4.3 Belanja Modal Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jaringan periode 31 desember 2021 dan 31 desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00.

Rincian Belanja Modal Jaringan disajikan dalam tabel berikut ini:

fjtnika 2010-11-10 23:10 ✓
Formatted: Font: (Default) Arial, Finnish

Tabel 10. Perbandingan Belanja Modal Jaringan TA 2021 dan TA 2020

(dalam rupiah)

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2021	TA 2020	(Rp)	%
Belanja Modal Jaringan				
Realisasi Belanja Bruto				
Pengembalian				-
Realisasi Belanja Netto				

B.4.4 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya periode 31 desember 2021 dan 31 desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00. Realisasi Belanja Modal Lainnya mengalami kenaikan sebesar Rp 0,00 atau 0,00% dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Lainnya periode 31 desember 2020.

Rincian Belanja Modal Lainnya disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 11. Perbandingan Belanja Modal Lainnya TA 2021 dan TA 2020

(dalam rupiah)

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2021	TA 2020	(Rp)	%
Belanja Modal Lainnya				
Realisasi Belanja Bruto				
Pengembalian				-
Realisasi Belanja Netto				

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di Bendahara
Pengeluaran Rp
0,00

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00, terjadi kenaikan sebesar Rp 0,00 atau 0,00%. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca.

Tabel 12. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Per 31 desember 2021 dan 31 Desember 2020

(dalam rupiah)

No.	Keterangan	30 desember 2021	31 Desember TA 2020
1.	Uang Persediaan per 30 desember 2021	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00

Belanja Dibayar
Dimuka (Prepaid)
Rp0,00

C.2 Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid)

Saldo Belanja Dibayar Dimuka per tanggal 31 desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00, terjadi penurunan sebesar Rp 0,00 atau 0,00% dikarenakan tidak adanya pelunasan persekot. Belanja dibayar dimuka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari telah dibayarkannya secara penuh belanja dan membebani anggaran Tahun Anggaran berjalan namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

Tabel 13. Rincian Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid) Per 30 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

(dalam rupiah)

No	Jenis	30 Juni 2021	31 Desember 2020
1.	Persekot Gaji	-	-
JUMLAH		-	-

Piutang Bukan Pajak Rp0,00

C.3 Piutang Bukan Pajak

Nilai Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00, terjadi penurunan sebesar Rp 0,00 atau 0,00%. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan Pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan dan belum diselesaikan pembayaran atau serah terimanya pada akhir Tahun Anggaran per tanggal pelaporan.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih– Piutang Bukan Pajak Rp0,00

C.4 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak per 31 desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp 0,00 dan sebesar Rp 0,00, terjadi penurunan sebesar Rp 0,00 atau 0,00%.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Piutang Jangka Pendek yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang/debitur.

Tabel 15. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang Bukan Pajak Per 31 Desember 2021

(dalam rupiah)

No.	Jumlah Debitur	Kualitas	Nilai Bagian Lancar	Penyisihan	Nilai Penyisihan
Nihil					

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Rp0,00

C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Bagian Lancar pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau berasal dari Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) per tanggal 31 desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00. Terjadi penurunan sebesar Rp 0,00 atau 0,00%. Bagian Lancar Tagihan TGR merupakan Tagihan TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Tabel 16. Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

(dalam rupiah)

No	Uraian	30 Desember 2021	31 Desember 2020
1.	-	-	-
JUMLAH			

C.6 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Rp0,00

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp 0,00 dan sebesar Rp 0,00, terjadi penurunan sebesar Rp 0,00 atau 0,00%.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang/debitur.

Tabel 17. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Per 31 Desember 2021

(dalam rupiah)

No.	Jumlah Debitur	Kualitas	Nilai Bagian Lancar	Penyisihan	Nilai Penyisihan
NIHIL					

C.7 Persediaan

Persediaan Rp 2.111.164,00

Nilai Persediaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp 2.111.164,00 dan Rp 2.111.164,00, terjadi terdapat kenaikan atau penurunan sebesar Rp 0,00 atau 0%.

Persediaan merupakan jenis Aset Lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

fjatnika 2010-11-10 23:10 ✓
Formatted: Font: (Default) Arial, Finnish

Tabel 18. Rincian Persediaan

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2021	Mutasi	31 Desember 2020
1	Barang Konsumsi	2.111.164,00	-	2.111.164,00
2	Bahan Untuk Pemeliharaan	-	-	-
3	Persediaan lainnya	-	-	-
Jumlah		2.111.164,00	-	2.111.164,00

Nilai persediaan diatas berdasarkan Berita Acara Opname Fisik Persediaan Tanggal 4 Januari 2021. Jumlah persediaan yang rusak/usang yaitu atas barang konsumsi senilai Rp 0,00 dan tidak disajikan dalam neraca pada persediaan.

C.8 Persediaan Yang Belum Diregister

Persediaan yang belum diregister Rp 0,00

Nilai Persediaan yang belum diregister per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00, terjadi penurunan sebesar Rp 0,00 atau 0,00%.

Adapun rincian atas persediaan yang belum diregister adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah
1	Belum di GU kan	-
2	Belum di GU kan	-
Total		-

Tanah Rp 0,00

C.9 Tanah

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki Pengadilan Negeri Lubuklinggau per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00.

Mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

(dalam rupiah)

Saldo per 31 Desember 2020	0,00
Mutasi tambah:	0,00
Mutasi kurang:	0,00
Jumlah Mutasi	0,00
Saldo per 31 Desember 2021	0,00

fjatnika 2010-11-10 23:10

Formatted: Font: (Default) Arial, Finnish



Tabel 19. Rincian Saldo Tanah Per 31 Desember 2021

fjatnika 2010-11-10 23:10 ✓

Formatted: Font: (Default) Arial, Finnish

fjatnika 2010-11-10 23:10 ✓

Formatted: Font: (Default) Arial, 11 pt

Peralatan dan **C.10 Peralatan dan Mesin**

Mesin Rp 0,00

Saldo Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah Rp 0,00 dan Rp 0,00, terjadi kenaikan sebesar Rp 0,00.

Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

(dalam rupiah)

Saldo per 31 Desember 2020	-
Pembelian	-
Jumlah Mutasi Tambah	-
Transfer Keluar	-
Jumlah Mutasi Kurang	-
Jumlah Mutasi	-
Saldo per 31 Desember 2021	-
Akumulasi Penyusutan	-
Nilai Buku	-

Gedung dan
Bangunan Rp
0,00

C.11 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah Rp 0,00 dan Rp 0,00.

Mutasi nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

(dalam rupiah)

Saldo per 31 Desember 2020	
Jumlah Mutasi Tambah	
Jumlah Mutasi Kurang	
Jumlah Mutasi	
Saldo per 31 Desember 2021	
Akumulasi Penyusutan	
Nilai Buku	

Jalan, Irigasi
dan Jaringan
Rp 0,00

C.12 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00.

Mutasi nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

(dalam rupiah)

Saldo per 31 Desember 2020	
Jumlah Mutasi Tambah	
Jumlah Mutasi Kurang	
Jumlah Mutasi	
Saldo per 31 Desember 2021	
Akumulasi Penyusutan	
Nilai Buku	

fjatnika 2010-11-10 23:10 ✓

Formatted: Font: (Default) Arial, Finnish

fjatnika 2010-11-10 23:10 ✓

Formatted: Font: (Default) Arial, 11 pt

Aset Tetap
Lainnya Rp
0,00

C.13 Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah Rp 0,00 dan Rp 0,00, terdapat kenaikan sebesar Rp 0,00 dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020.

Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

(dalam rupiah)

Saldo per 31 Desember 2020	-
Pembelian	
Jumlah Mutasi Tambah	-
Jumlah Mutasi Kurang	-
Jumlah Mutasi	-
Saldo per 31 Desember 2021	-
Akumulasi Penyusutan	-
Nilai Buku	-

Tidak adanya Mutasi tambah Aset Tetap Lainnya yang terjadi pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau

Konstruksi
Dalam
Pengerjaan Rp
0,00

C.14 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing Rp 0,00 dan Rp0,00, terjadi kenaikan sebesar Rp 0,00 atau 0,00%. Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan pembangunan gedung tempat kerja pada Satuan Kerja dibawah lingkungan Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca.

Rincian Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada tanggal pelaporan, disajikan pada tabel dibawah:

Saldo per 31 Desember 2020	
Perolehan KDP	
Jumlah Mutasi Tambah	
Jumlah Mutasi Kurang	
Jumlah Mutasi	
Saldo per 31 Desember 2021	

fjatnika 2010-11-10 23:10 ✓

Formatted: Font: (Default) Arial, Finnish

fjatnika 2010-11-10 23:10 ✓

Formatted: Font: (Default) Arial, 11 pt

Akumulasi

C.15 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan

Aset Tetap Rp

0,00

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing Rp 0,00 dan Rp 0,00, terjadi penurunan sebesar Rp 0,00 atau 0,00%. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Piutang Tagihan

C.16 Piutang Tagihan TP/TGR

TP/TGR Rp 0,00

Nilai Piutang Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah Rp 0,00 dan Rp 0,00, terjadi kenaikan sebesar Rp 0,00 dibandingkan dengan saldo Piutang Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2020.

Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada Bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian Negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan Bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Negara karena kelalaiannya.

Piutang Tagihan pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau berasal dari Tuntutan Ganti Rugi (TGR).

Rincian saldo Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) adalah sebagai berikut :

No	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1.	-	-	-
	JUMLAH	-	-

Nilai Piutang Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 30 desember 2021 tidak menggambarkan mutasi yang sebenarnya dikarenakan terdapat kesalahan akun dalam penyeteroran, ralat akun tersebut akan diselesaikan pada Rekonsiliasi bulan Agustus 2021.

Rincian nilai yang seharusnya adalah :

Uraian	Nilai TGR	Angsuran	Saldo per 31 Desember 2021
-	-	-	-

fjatnika 2010-11-10 23:10 ✓

Formatted: Font: (Default) Arial, Finnish

fjatnika 2010-11-10 23:10 ✓

Formatted: Font: (Default) Arial, 11 pt

Penyisihan

C.17 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan TP/TGR

Piutang Tidak

Saldo Penyisihan Piutang Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Tertagih -

adalah Rp 0,00 dan Rp 0,00, terjadi kenaikan sebesar Rp 0,00 dibandingkan dengan saldo

Tagihan TP/TGR

Penyisihan Piutang Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2020.

Rp 0,00

No.	Jumlah Debitur	Kualitas	Nilai Bagian Lancar	Penyisihan	Nilai Penyisihan
1.	-	-	-	-	-
Total			-	-	-

Aset Tak

C.18 Aset Tak Berwujud

Berwujud Rp

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah Rp

0,00

0,00 dan Rp 0,00.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada lingkup Pengadilan Negeri Lubuklinggau berupa *software* dan *lisensi* yang digunakan untuk menunjang operasional kantor.

Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai Berikut :

(dalam rupiah)

Saldo per 31 Desember 2020	
Jumlah Mutasi Tambah	
Jumlah Mutasi Kurang	
Jumlah Mutasi	
Saldo per 31 Desember 2021	
Akumulasi Penyusutan	
Nilai Buku	

Aset Lain-Lain

C.19 Aset Lain-Lain

Rp 0,00

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah Rp 0,00 dan Rp

0,00, terjadi penurunan sebesar Rp 0,00 atau sebesar 0,00%.

Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional lingkup Pengadilan Negeri Lubuklinggau serta dalam proses penghapusan dari BMN.

fjatnika 2010-11-10 23:10 ✓

Formatted: Font: (Default) Arial, Finnish

fjatnika 2010-11-10 23:10 ✓

Formatted: Font: (Default) Arial, 11 pt

Adapun mutasi Aset Lain-Lain adalah sebagai berikut :

(dalam rupiah)

Saldo per 31 Desember 2020	
Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola	
Jumlah Mutasi Kurang	
Jumlah Mutasi	
Saldo per 31 Desember 2021	
Akumulasi Penyusutan	
Nilai Buku	

Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya Rp 0,00

C.20 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing Rp 0,00 dan Rp 0,00, terjadi penurunan sebesar Rp 0,00 atau 0,00%.

Akumulasi Penyusutan tersebut merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya 30 desember 2021 disajikan pada tabel di bawah :

Tabel 21. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
	Akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya			
	Jumlah	-	-	-

Utang Kepada
Pihak Ketiga
Rp0,00

C.21 Utang kepada Pihak Ketiga

Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga

No	Uraian	Jumlah	Penjelasan
	NIHIL		

Pendapatan

C.22 Pendapatan Diterima di Muka

Diterima

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan.

Dimuka Rp 0,00

Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari pendapatan sewa tanah/gedung yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun.

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka

No	Uraian	Jumlah
	NIHIL	

Uang muka dari

C.23 Uang Muka dari KPPN

KPPN Rp 0,00

Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00.

Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Ekuitas Rp

C.24 Ekuitas

2.111.164,00

Ekuitas per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 2.111.164,00 dan Rp 2.111.164,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

fjatnika 2010-11-10 23:10 ✓

Formatted: Font: (Default) Arial, Finnish

fjatnika 2010-11-10 23:10 ✓

Formatted: Font: (Default) Arial, 11 pt

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNBP

Rp 38.943.500,00

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 31.194.500,00 dan Rp 58.707.021,00. Pendapatan tersebut terdiri dari :

Tabel 22. Perbandingan Rincian Pendapatan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik (Turun) %
Pendapatan PNBP Lainnya				
Pendapatan dari pengelolaan BMN serta Pendapatan dari Penjualan				
1	Pendapatan Negara Bukan Pajak	38.943.500,00	31.194.500,00	24,84
Jumlah Pendapatan BMN serta Pendapatan dari Penjualan		38.943.500,00	31.194.500,00	24,84
Pendapatan Lain-Lain				
1	Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian	0,00	0,00	100,00
2	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0,00	0,00	100,00
Jumlah Pendapatan Lain-Lain		0,00	0,00	100,00
Total		38.943.500,00	31.194.500,00	24,84

Pendapatan dari pengelolaan BMN berasal dari pendapatan negara bukan pajak Pengadilan Negeri Lubuklinggau Jl. Depati said No. 1.

D.2 Beban Pegawai

Beban Pegawai Rp 0,00

Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

fjatnika 2010-11-10 23:10 ✓

Formatted: Font: (Default) Arial, Finnish

fjatnika 2010-11-10 23:10 ✓

Formatted: Font: (Default) Arial, 11 pt

Perbandingan Rincian Beban Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 23. Perbandingan Rincian Beban Pegawai 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik (Turun) %
1	Beban Gaji Pokok PNS	0,00	0,00	#DIV/0!
2	Beban Pembulatan Gaji PNS	0,00	0,00	#DIV/0!
3	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	0,00	0,00	#DIV/0!
4	Beban Tunj. Anak PNS	0,00	0,00	#DIV/0!
5	Beban Tunj. Struktural PNS	0,00	0,00	#DIV/0!
6	Beban Tunj. Fungsional PNS	0,00	0,00	#DIV/0!
7	Beban Tunj. PPh PNS	0,00	0,00	#DIV/0!
8	Beban Tunj. Beras PNS	0,00	0,00	#DIV/0!
9	Beban Uang Makan PNS	0,00	0,00	#DIV/0!
10	Beban Tunjangan Umum PNS	0,00	0,00	#DIV/0!
11	Beban Uang Lembur	0,00	0,00	#DIV/0!
12	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	0,00	0,00	#DIV/0!
Total		0,00	0,00	#DIV/0!

Beban Persediaan

Rp 98.839.500,00

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 98.839.500,00 dan Rp 100.664.500,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Tabel 24. Perbandingan Rincian Beban Persediaan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik (Turun) %
1	Beban Persediaan Konsumsi	98.839.500,00	100.664.500,00	(1,8)
2	Beban Persediaan Lainnya	0,00	0,00	
Total		98.839.500,00	100.664.500,00	(1,8)

Beban Barang dan

Jasa Rp

108.790.913,00

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 108.790.913,00 dan Rp 113.345.188,00. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas, serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 25. Rincian Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020*(dalam Rupiah)*

No	Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik (Turun) %
1	Beban Keperluan Perkantoran	8.286.713,00	3.928.688,00	110,93
2	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1.235.000,00	1.658.500,00	(25,54)
3	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	0,00	0,00	#DIV/0!
4	Beban Barang Operasional Lainnya	0,00	0,00	#DIV/0!
5	Beban Bahan	75.269.200,00	81.558.000,00	(7,71)
6	Beban Honor Output Kegiatan	0,00	0,00	#DIV/0!
7	Beban Barang Non Operasional Lainnya	0,00	0,00	#DIV/0!
8	Beban Langganan Listrik	0,00	0,00	#DIV/0!
9	Beban Langganan Telepon	0,00	0,00	#DIV/0!
10	Beban Langganan Air	0,00	0,00	#DIV/0!
11	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	0,00	0,00	#DIV/0!
12	Beban Jasa Konsultansi	24.000.000,00	26.200.000,00	(8,40)
13	Beban Sewa	0,00	0,00	#DIV/0!
14	Beban Jasa Profesi	0,00	0,00	#DIV/0!
15	Beban Jasa Lainnya	0,00	0,00	#DIV/0!
	Total	108.790.913,00	113.345.188,00	(4,02)

Beban
Pemeliharaan Rp
0,00

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban pemeliharaan pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan Aset Tetap atau Aset Lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 26. Rincian Beban Pemeliharaan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020*(dalam Rupiah)*

No	Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik (Turun) %
1	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	#DIV/0!
2	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00	100,00
3	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	#DIV/0!
4	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	#DIV/0!
5	Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	0,00	0,00	#DIV/0!
	Total	0,00	0,00	#DIV/0!

Beban Perjalanan
Dinas Rp
165.748.000,00

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 165.748.000,00 dan Rp 142.708.000,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan.

Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN | PENJELASAN ATAS POS-POS LK 38

fjatnika 2010-11-10 23:10 ✓
Formatted: Font: (Default) Arial, Finnish
fjatnika 2010-11-10 23:10 ✓
Formatted: Font: (Default) Arial, 11 pt

Tabel 27. Rincian Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020
(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik (Turun) %
1	Beban Perjalanan Biasa	4.680.000,00	1.440.000,00	225,00
2	Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	161.622.000,00	165.748.000,00	(2,49)
3	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota	0,00	0,00	#DIV/0!
4	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting luar Kota	0,00	0,00	#DIV/0!
5	Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	0,00	0,00	#DIV/0!
Total		166.302.000,00	167.188.000,00	(0,53)

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp 0,00

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu Aset Tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 28. Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2021	2020	Naik (Turun) %
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	#DIV/0!
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	#DIV/0!
3	Beban Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	#DIV/0!
Jumlah Penyusutan		0,00	0,00	#DIV/0!
1	Beban Amortisasi Software	0,00	0,00	#DIV/0!
2	Beban Amortisasi Lisensi	0,00	0,00	#DIV/0!
Jumlah Amortisasi		0,00	0,00	#DIV/0!
1	Beban Penyusutan Aset Lain-Lain	0,00	0,00	#DIV/0!
Total		0,00	0,00	#DIV/0!

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Rp 0,00

D.8 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00.

Tabel 29. Rincian Beban Piutang tak Tertagih 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik (Turun) %
1	Beban Penyisihan Piutang PNB	-	-	#DIV/0!
2	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	-	-	#DIV/0!
3	Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	-	-	#DIV/0!
4	Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	-	-	#DIV/0!
Total		-	-	#DIV/0!

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Rp 0,00

D.9 Surplus dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas.

Surplus dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Surplus dari Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 30. Rincian Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik (Turun) %
1	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya			#DIV/0!
2	Pendapatan Pelunasan Piutang Non Bendahara			#DIV/0!
3	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL			#DIV/0!
4	Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL			#DIV/0!
5	Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL			#DIV/0!
6	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan			#DIV/0!
7	Beban Penyesuaian nilai Persediaan			#DIV/0!
Total				#DIV/0!

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

*Ekuitas Awal Rp
2.111.164,00*

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 2.111.164,00 dan Rp 2.111.164,00.

*Defisit LO Rp
(344.944.243,00)*

E.2 Defisit LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah defisit sebesar Rp (344.944.243,00) dan Rp (356.441.393,00). Defisit LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional dan kejadian luar biasa.

*Selisih Revaluasi
Aset Tetap Rp
0,00*

E.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00.

*Koreksi Nilai Aset
Tetap Non
Revaluasi Rp 0,00*

E.4 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00.

*Koreksi lain-lain
Rp 0,00*

E.5 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar 0,00 dan Rp 0,00.

No	Uraian	Jumlah
1	Temuan BPK RI Tahun 2020	
Total		

*Transaksi Antar
Entitas Rp
344.944.243,00*

E.6 Transaksi Antar Entitas

Nilai transaksi antar ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 344.944.243,00 dan Rp 356.441.393,00. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

fjatnika 2010-11-10 23:10 ✓

Formatted: Font: (Default) Arial, Finnish

fjatnika 2010-11-10 23:10 ✓

Formatted: Font: (Default) Arial, 11 pt

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	373.932.413,00
Diterima dari Entitas Lain	(38.943.500,00)
Transfer Masuk	9.955.330,00
Pengesahan Hibah Langsung	
	344.944.243,00

E.6.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2021, DDEL sebesar Rp (38.943.500,00) sedangkan DKEL sebesar Rp 373.932.413,00.

E.6.2 Transfer keluar

Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL, dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 0,00

E.7 Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas pada tanggal 30 desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 2.111.164,00 dan Rp 2.111.164,00.

Ekuitas Akhir Rp
0,00

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1. Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

Tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal neraca per 31 Desember 2021 pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang mempengaruhi penyajian posisi Laporan Keuangan per 31 Desember 2021.

F.2. Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI

Tidak terdapat temuan pemeriksaan BPK RI atas pengadaan barang/jasa pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang menuntut penyelesaian berupa pengembalian oleh Pihak Ketiga ke Kas Negara

F.3. Pengungkapan Lain-Lain

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Lubuklinggau untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 menyajikan pengungkapan-pengungkapan yang meliputi:

1. Terdapat beberapa rekening pada Satuan Kerja Pengadilan Negeri Lubuklinggau

Bendahara Pengeluaran Pengadilan Negeri Lubuklinggau tahun 2021 MA RI berfungsi sebagai koordinator yaitu menerima uang persediaan (UP) yang kemudian langsung didistribusikan seluruhnya sesuai dengan UP.

Dalam mengelola UP yang diberikan, Bendahara Pengeluaran pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau MA RI menyimpan sisa uang UP/TUP pada brankas dan rekening giro. Pada tahun 2021, rekening giro yang dibuka oleh Bendahara Pengeluaran Pengadilan Negeri Lubuklinggau MA RI sebagai berikut:

Rincian Rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu

No.	Unit Kerja	Nomor Rek BRI	Tanggal Pembukaan Rekening
1	Penampung DIPA BUA	653240989701000	S-896/WPB.12/KP.06/2021
2	Penampung DIPA BADILUM	654450992291000	S-896/WPB.12/KP.06/2021
3	Penampungan Perkara	2209202112	S-368/WPB.07/KP.05/2021

fjatnika 2010-11-10 23:10 ✓

Formatted: Font: (Default) Arial, Finnish

fjatnika 2010-11-10 23:10 ✓

Formatted: Font: (Default) Arial, 11 pt

LAPORAN KEUANGAN Pengadilan Negeri Lubuklinggau TRIWULAN III TAHUN 2021

Pengadilan Negeri Lubuklinggau melalui Biro Keuangan telah mengajukan permohonan izin pembukaan rekening ke KPPN Lubuklinggau VI melalui Surat No.S-209/WPB.07/KP.0430/2021 tanggal 24 Juni 2021, dan mendapatkan persetujuan dari Kepala KPPN Lubuklinggau sesuai Surat Nomor: No.S-896/WPB.12/KP.06/2021 tanggal 24 Juni 2021.

1. Tidak ada penjelasan terkait Jurnal Bantu pada menu Jurnal Penyesuaian dan Jurnal Umum aplikasi SAIBA 2021.

2. Tidak ada perbaikan Transaksi SPM/SP2D



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN | PENGUNGKAPAN PENTING 45

fjatnika 2010-11-10 23:10 ✓

Formatted: Font: (Default) Arial, Finnish

fjatnika 2010-11-10 23:10 ✓

Formatted: Font: (Default) Arial, 11 pt

3. Berdasarkan Keputusan Kepala Biro Keuangan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : SK-23/Pengadilan Negeri Lubuklinggau.3/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Di Lingkungan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Negeri Lubuklinggau Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : SK-337/Pengadilan Negeri Lubuklinggau.3/KPA/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020 tentang Penunjukan Pejabat Penguji/Penandatanganan Surat Permintaan Membayar, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Staf Pengelola Keuangan Di Lingkungan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Mahkamah Agung Republik Indonesia, telah menunjuk,
- | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Kuasa Pengguna Anggaran | : PATRA SUKMA, S.Kom., S.H., M.H |
| Pejabat Pembuat Komitmen | : PATRA SUKMA, S.Kom., S.H., M.H |
| Pejabat Penandatanganan/Penguji SPM | : MULYATI, S.Sos. |
| Bendahara Pengeluaran | : LENI SARTIKA, A.Md. |
| Bendahara Penerimaan | : RUSMAN EDWAR, S.Kom. |
| Operator SIMAK BMN | : ANDERIANSYAH, S.Kom., M.A.P |
| Operator SAIBA / PERSEDIAAN | : ROLI RAHMADYA, A.Md |